



Komisi D DPRD Kota Jogja Paparkan Evaluasi Penerimaan Peserta Didik Baru TA 2023/2024

Dari Soal Sumbangan, Jual Beli Seragam, hingga Elaborasi Sistem Zonasi



SURYANI

PENERIMAAN Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun Ajaran (TA) 2023/2024 tingkat SD dan SMP di Kota Jogja baru saja rampung. Para siswa juga telah melewati masa pengenalan lingkungan sekolah (MPLS). Kini peserta didik telah mengikuti kegiatan belajar mengajar (KBM) di sekolah. Ada beberapa catatan diberikan Komisi D DPRD Kota Jogja. Apa saja?

Ketua Komisi D DPRD Kota Jogja Suryani menjelaskan telah disepakatinya rancangan peraturan daerah (raperda) tentang penyelenggaraan pendidikan menjadi peraturan daerah. Ada beberapa hal diatur da-

lam perda yang pembahasannya dilakukan bersama antara Dewan Kota dengan Pemkot Jogja.

"Dalam penyelenggaraan pendidikan kita tidak boleh ada beban. Diatur adanya sumbangan. Namanya sumbangan itu bersifat sukarela. Tidak mengikat," jelas Yani, sapaan akrabnya dalam sebuah perbincangan bertajuk soal Evaluasi PPDB di Kota Jogja yang berlangsung baru-baru ini.

Dikatakan, aturan menyangkut sumbangan itu perlu diketahui masyarakat. Sebab, menjadi cantolan atau regulasi bagi sekolah, komite dan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Jogja. » *Baca Dari... Hal 11*



AWAL MASUK SEKOLAH: Sejumlah siswa SMP Negeri 15 Jogja mengikuti masa pengenalan sebagai bagian sebelum mengikuti kegiatan belajar mengajar di sekolah tersebut.

Dari Soal Sumbangan, Jual Beli Seragam, hingga Elaborasi Sistem Zonasi

Sumbangan dari hal 1

Dengan merujuk ketentuan itu, Suryani berharap tak ada lagi muncul pungutan बदलह sumbangan atau apapun namanya yang berpotensi menimbulkan polemik.

"Kita harus pahami penyelenggaraan pendidikan dasar kita bersifat gratis," ingat mantan pengajar akuntansi di Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) ini.

Di samping soal sumbangan, Yani juga menyinggung larangan jual beli seragam yang melibatkan sekolah. Meski demikian, ada beberapa kendala di lapangan. Di antaranya, menyangkut seragam identitas dan olahraga. Keduanya tidak mungkin tidak dibeli di sekolah. Ada persoalan saat harga kedua seragam itu tidak murah. Bagi keluarga kurang mampu bisa menjadi beban.

Padahal bila anak tidak mengenakan seragam identitas itu muncul perasaan yang menimbulkan rendah diri. "Anak-anak itu perasa-

kalau tidak sama dengan rekan-rekannya. Kami ingat sekali lagi, soal seragam identitas sekolah jangan sampai menjadi beban," ulangnya.

Yani menyarankan agar sekolah juga membuka opsi seragam yang sudah digunakan mereka lulus bisa dipakai adik-adik angkatannya. Kalau seragam identitas itu masih bagus bisa dimanfaatkan. "Seragam lungsuran sepanjang masih bagus dan layak pakai tidak ada masalah," sarannya.

Komisi D, lanjut, ibu dua putra ini, mendukung penuh penyelenggaraan pendidikan gratis di Kota Jogja. Dukungan itu antara lain berupa anggaran. Alokasi anggaran pendidikan di Kota Jogja mencapai 24 persen. Lebih tinggi 4 persen dari regulasi nasional yang mewajibkan minimal 20 persen.

"Kami akan support demi keberlangsungan kegiatan belajar mengajar yang bermutu baik," ungkap Yani. Kembali soal PPDB, Yani

berharap di masyarakat tidak ada lagi persepsi sekolah favorit dan bukan favorit. Sebagai pimpinan Komisi D, dia mengapresiasi langkah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Jogja yang memadukan PPDB dengan sistem zonasi wilayah dath nilai.

"Elaborasi itu berhasil meminimalkan berbagai persoalan. PPDB di Kota Jogja relatif berjalan baik dan tidak ada masalah yang berlarut-larut," katanya mengapresiasi. Elaborasi itu dipandang penting. Sebab, distribusi lokasi sekolah di Kota Jogja tidak merata. Sebagian besar berada di utara dan tengah. Sedangkan wilayah selatan hanya ada dua SMP negeri. Bila sistem zonasi wilayah yang dilakukan secara penuh, anak-anak dari selatan tidak mungkin bisa diterima di sekolah wilayah utara dan tengah. "Dengan elaborasi itu mampu mengatasi kondisi tersebut," katanya.

Namun demikian, Yani memiliki catatan terhadap

PPDB TA 2023/2024 ini. Di antaranya, ada keluhan ada masalah jaringan internet saat pendaftaran. Juga adanya siswa yang berada di zonasi 500 meter dari sekolah justru tidak diterima.

Kemudian ada laporan banyaknya penduduk luar kota yang dimasuk dalam kartu keluarga (KK) Kota Jogja. "Ini yang menjadi perhatian," beber anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Jogja ini.

Bincang-bincang yang dipandu Wakil Ketua DPRD Kota Jogja Dhan Novitasari juga menghadirkan Penilik Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Jogja Rahmat. Dia mengatakan aturan PPDB di Kota Jogja akan terus disempurnakan. Selama ini persiapan PPDB telah dilakukan jauh-jauh hari. Tepatnya sejak Januari 2023. "Kalau MPLS ruhnya adalah pengenalan sekolah kepada siswa baru. *Alhamdulillah* semua berjalan lancar dan baik," ucap Rahmat. (kus/by)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 22 Juli 2026

Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005